



FAKULTAS HUKUM

ISSN 0216-5740

H. 45

● **KONSEP PRODUCT LIABILITY DAN PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA**

Oleh : Muhammad Amin

● **TERJEMAH AL-QUR'AN**

Oleh : Harmen Kh

● **AL-FATWA AL-FATWA MATERIALISME**

Oleh : Albert Y. Dien, SH, M.H., M.Si

● **GAGASAN PEMERINTAH DALAM MENENTUKAN HUKUM TANAH MANDIRI ( Suatu Telaah Dari Berbagai Sudut Pandang Hukum, Mediasi, Reforma Agraria dan Kearifan Lokal )**

Oleh : Dr. Aslan Noor, SH, MH, CN

● **LIHAT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh : Sukanto Prakoso, SH, MH

● **PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh : Annie Myranika



**GAGASAN PEMBENTUKAN PENGADILAN TANAH  
MENUJU HUKUM TANAH MANDIRI  
(Suatu Telaahan Dari Berbagai Sudut Pandang Hukum Mediasi,  
Reforma Agraria dan Kearifan Lokal)**

Oleh  
Dr. Aslan Noor, SH.,MH.,CN.\*)

**Abstrak**

Tanah di bumi Indonesia memegang peranan yang sangat sentral. Jika kita perhatikan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun ini pertumbuhan penduduk hampir mencapai 200%. Sementara itu tanah tidak bertambah, bahkan cenderung berkurang banyaknya penggunaan tanah untuk berbagai keperluan ditambah faktor bencana alam yang terus melanda. Sejak tahun 1996 s/d sekarang di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tercatat 23 kasus mengenai ganti rugi, 11 kasus tentang pengurusan Hak Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus pertanahan senantiasa aa sehingga penghargaan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Namun sayang dalam pemerintah baik DPR maupun peradilan disinyalir mandul dalam menyelesaikan perkara tanah.

**Kata kunci : Hukum Tanah**

**A. PENDAHULUAN**

**Problema Tanah Di Indonesia**

Problema tanah di Indonesia termasuk sesuatu yang delematis dan dapat dikategorikan rawan. Banyaknya keluhan masyarakat yang terkena pengurusan atas tanah miliknya dengan dalil atau atribut pembangunan, lambatnya penanganan sengketa serta tidak jelasnya arah filosofi

judiciary process maupun melalui dading (mediasi) dengan dasar musyawarah, semakin menunjukkan pelik dan bepolemiknya kasus pertanahan di Indonesia dari masa ke masa.

Dalam negara hukum yang demokratis, seharusnya peraturan perundang-undangan dibuat setuntas mungkin. Artinya, penanganan permasalahan-pertanahan dalam suatu sistematis jenis hukum telah teratur secara pasti, tepat dan terukur serta terkodifikasi dalam hukum materil dan formil, sebab kita menemukan

\* ) Penulis adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang